

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi masyarakat baik sebagai lahan bercocok tanam maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan dalam hal ini khususnya petani. Petani yang memerlukan tanah pertanian sebagai sarana untuk mempertinggi produksi pertanian dan upaya untuk bertahan hidup “Tanah pertanian sangat penting nilainya dalam suatu bangsa, karena sebagai salah satu penopang ketahanan pangan di suatu negara karena penting nya tanah pertanian, maka tanah pertanian perlu diatur keberadaannya agar tidak dikuasai secara besar-besaran oleh sebagian pihak saja”¹. Hal ini harus sesuai dengan dasar Negara Indonesia yang tercantum pada Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak mendapat kesempatan yang sama dalam kepemilikan tanah, khususnya tanah pertanian.

Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat dan pembangunan suatu bangsa. Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan

¹ Stevanus fourista Handayanto. *Pemilikan tanah pertanian secara Absentee oleh Pegawai Negeri Sipil dan yang dipersamakan dengan pegawai negeri sipil di wilayah Kab Sleman*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Hal 6

Sebab kelangsungan hidup manusia untuk memperoleh suatu bahan makanan sebagian besar berasal dari pengelolaan tanah²

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana luas negara Indonesia adalah 5.180.053 km² dengan luas lautan 3.257.483 km² dan luas daratan berjumlah 1.922.570 km².³ Dengan kenyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara agraris karena 42% atau 8.111.593 Ha merupakan lahan sawah atau tanah pertanian⁴ yang dikerjakan oleh para petani, baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap, maupun buruh tanah yang berdasarkan perjanjian bagi hasil ataupun perjanjian sewa. Hasil dari penelitian terdahulu di Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa petani yang tidak memiliki tanah berjumlah 876 orang sedangkan yang memiliki Tanah Pertanian sendiri sebanyak 1.169 Orang dengan luas < 0,1 ha dan > 1 Ha berjumlah satu orang⁵. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan petani tersebut tidak semua nya memiliki tanah. Para petani yang tidak memiliki tanah tersebut mengerjakan tanah melalui perjanjian bagi hasil atau sewa dan bisa disebut dengan ⁶.

Dari kepemilikan tanah ternyata tidak semua pemilik tanah pertanian tersebut merupakan pemilik yang tidak sesuai dengan persyaratan Undang-Undang untuk tanah kepemilikan tanah pertanian. Dalam hal ini ada yang

² M Hasbi Maulana .2017.*Peran Kantor Pertanahan mengatasi kepemilikan tanah Absentee/Guntai Kabupaten malang* .Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang .Hal 11

³ <https://letak.geografisindonesia.Wikipedia.co.id/>, diakses tanggal 25 November 2017

⁴ <https://bps.go.id/>, diakses tanggal 25 November 2017

⁵ Ariska Dewi . *Peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi kepemilikan Tanah Absentee/Guntai di Kab Banyumas*.Thesis.Universitas Diponegoro Semarang .Hal 58

⁶ Ibid. Hal, 62

memenuhi persyaratan Undang-Undang dengan cara tinggal di kecamatan letak tanah tersebut dan memanfaatkan tanah tersebut secara aktif dan ada pula yang tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang terkait kepemilikan tanah pertanian yang tinggal diluar kecamatan letak tanah tersebut dan tidak memanfaatkan tanah tersebut secara aktif (yang disebut dengan kepemilikan tanah Absentee/Guntai) walaupun sudah dijelaskan terkait larangan kepemilikan tanah Absentee/Guntai dalam Pasal 10 UU No 5 Tahun 1960 UUPA dan peraturan pelaksanaan terkait dengan ketentuan Pasal 33 Ayat UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan tanah Absentee/guntai di kabupaten Bantul yang masih banyak terjadi di tiap tahun nya baik yang dimiliki warga masyarakat biasa maupun PNS. Dari seluruh tanah Absentee/Guntai tersebut ada yang masih tetap dimiliki dan ada yang ditelantarkan begitu saja⁷ ”Tanah itu dibeli bukan untuk diolah sebagaimana peruntukan tanah nya tatapi dibeli sebagai sarana investasi dan jual beli tanah setelah harga nya tinggi”⁸ Berdasarkan penelitian “Fitri Nur Sholikhah ternyata lebih dari 6,4% Kabupaten Karanganyar berstatus tanah Absentee/Guntai”⁹

Erat nya hubungan antara manusia dan tanah tertuang dalam Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

⁷ Juraida. *Pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian Absentee/Guntai Kabupaten Bantul*.Skripsi.Universitas Sunan Kalijaga.Yogyakarta.Hal 32

⁸ Syamsu alam .*Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tanah absentee dan dampaknya bagi masyarakat di Kecamatan Binuang Kab Polewalimandar*.Universitas Unasman .Hal 102

⁹ Fitri Nur Sholikhah. *Peralihan Hak atas Tanah Absentee berkaitan dengan pelaksanaan catur tertib pertanahan di kabupaten Karanganyar*. Skripsi .Universitas Muhammadiyah Surakarta .Hal 50

besarnya kemakmuran rakyat”. Tanah sebagai bagian dari bumi dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan menghindari segala bentuk yang merugikan kepentingan umum. Seperti yang tertulis dalam salah satu tujuan negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 Alinea dua yaitu “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Melihat begitu erat nya hubungan manusia dengan tanah diharapkan masyarakat mampu mendayagunakan tanah dengan aktif. Namun masih banyak problematika yang terjadi di lapangan terkait pendaayagunaan tanah pertanian seperti tidak dikerjakan sendiri (tidak aktif), Terlantar, dan banyak orang setempat yang tinggal di tempat tanah pertanian itu serta bekerja di bidang pertanian namun tidak mempunyai tanah, sebaliknya yang mempunyai tanah pertanian tersebut adalah orang dari luar kecamatan atau kota letak tanah pertanian tersebut. Masalah yang terjadi di Desa Rempoah Kecamatan Baturaden Kab Banyumas terdapat pemilikan tanah absentee/Guntai yang masih tetap produktif dan aktif dikerjakan oleh petani penggarap nya sehingga sejauh ini tidak pernah ada tanah pertanian yang sampai terlantar atau tidak diurus, walaupun pemilik nya tidak tinggal di desa tersebut dan mereka menggunakan sistem “*Maro*” yaitu seluruh bibit berasal dari petani penggarap dan hasilnya dinikmati oleh petani penggarap¹⁰. Hal yang berbeda terkait masalah penggunaan tanah terjadi di Desa Ledung Kecamatan Kembaran yaitu pemilik dari tanah absentee/guntai tersebut banyak yang berasal dari luar kota bahkan dari Jawa, dan mereka semata-mata

¹⁰ Ariska Dewi *Op.cit.* hal 62

memiliki tanah-tanah tersebut hanya untuk Investasi sehingga mengakibatkan tanah-tanah tersebut menjadi terlantar¹¹

Dari permasalahan diatas, terdapat pelanggaran terkait kepemilikan tanah pertanian yang diatur pada UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Pasal 10 UUPA. Walaupun peraturan ini sudah jelas ditegakan masih ada yang melanggar sehingga dilihat dari tujuan *landreform* sendiri menjadi tidak tercapai. Program dan tujuan dari *landreform* diklasifikasikan menjadi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum tujuan *landreform* yaitu untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, dan secara khusus berdasarkan tujuan secara umum diatas maka *landreform* di Indonesia diarahkan agar dapat menjadi tiga aspek sekaligus yaitu tujuan Sosial Ekonomis yaitu : Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi sisi dan fungsi sosial pada hak milik; memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian. Kedua, Sosial Politis yaitu : Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan kepemilikan tanah yang luas serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil dan tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan gairah kerja bagi para petani penggarap dengan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan tanah dan memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap nya

¹¹ Ariska Dewi *Op.cit.* hal 68

Pada dasarnya, tanah pertanian harus dikerjakan secara aktif oleh pemilik tanah pertanian itu sendiri berdasarkan asas kewajiban atau mengusahakan sendiri secara aktif yang termuat dalam Pasal 10 UUPA No 5 Tahun 1960 yaitu terkait kepemilikan tanah absentee/guntai, Penguasaan tanah pertanian secara Absentee/Guntai yaitu kepemilikan tanah pertanian diluar kecamatan tempat tinggal letak tanah pertanian tersebut. Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok *landreform* yang diatur dalam pasal 10 UUPA No 5 Tahun 1960 dan dalam Pasal 4, 5, 6, 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 18 Tahun 2016, PP 224 Tahun 1961 dan UU No 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian sebagai Peraturan pelaksana Pasal 7, 10, 17 UUPA maksud dari pelarangan pemilikan tanah secara absentee/Guntai ini agar para petani bisa aktif dan efektif dalam mengerjakan tanah pertanian sehingga produktifitas tanah pertanian bisa tinggi dan diharapkan dapat menghilangkan atau memusnahkan kepemilikan tanah oleh para tuan-tuan tanah

Pada faktanya peraturan larangan mengenai pemilikan tanah pertanian secara Absentee/Guntai sudah sangat jelas dilarang, akan tetapi hal tersebut masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia seperti halnya hasil penelitian terdahulu oleh “Juraida di kabupaten Bantul, masih banyak sering terjadi kepemilikan tanah pertanian secara Absentee/Guntai di tiap tahun nya baik yang dimiliki oleh warga masyarakat biasa maupun PNS. Dari seluruh tanah Absentee/Guntai tersebut ada yang masih tetap dilmiliki pemiliknya, ada yang

di distribusi dan ada juga yang ditelantarkan begitu saja”¹². Berdasarkan hasil penelitian “Fitri Nur Sholikhah Kabupaten Karanganyar ternyata lebih dari 16,4% Kabupaten Karanganyar berstatus tanah Absentee/Guntai”¹³

Terkait dengan banyaknya kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai di Indonesia di beberapa wilayah yang telah diuraikan diatas tentu akan menimbulkan dampak antara lain dijelaskan berdasarkan hasil penelitian oleh “Syamsu alam bahwa dampak yang terjadi akibat kepemilikan tanah Absentee/Guntai di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewalimandar ada dua dampak yaitu dampak positif berupa terbuka peluang bagi warga yang strata rendah yang tidak memiliki lahan untuk mendapatkan lahan garapan sebagai petani penggarap (Peluang Kerja) sedangkan segi Negatif adalah menghambat Efektifitas program Landreform, menimbulkan sengketa tanah dan menghambat efektifitas pemasukan Pajak¹⁴. Sama hal nya yang dijelaskan oleh “Ariska Dewi bahwa, kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai akan berdampak tanah-tanah tersebut setelah dibeli sebagian ada yang dibiarkan begitu saja tidak diolah sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan tanah-tanah tersebut menjadi terlantar. Disamping itu, pemilik nya bertempat tinggal jauh diluar Jawa dan tidak selalu satu tahun sekali pulang, maka pihak aparat desa juga mengalami kesulitan dalam penarikan pajak nya¹⁵.

Berkaitan dengan hal tersebut terkait peran BPN/ATR sebagai penegak hukum yang memiliki fungsi dan tugas mengawasi dan penindakan terhadap

¹² Juraida, *Loc.cit.* hal

¹³ Fitri Nur Solikhah, *Loc.cit* hal 6

¹⁴ Syamsu Alam, *Loc.cit* hal 107

¹⁵ Ariska Dewi, *Loc.cit* hal 83

larangan kepemilikan tanah pertanian secara Absentee/Guntai adalah Badan Pertanahan Nasional / ATR sebagai pelaksana kebijakan di bidang pertanahan sangat diharapkan dalam pengawasan, penegakan dan penindakan terkait peraturan-peraturan yang ada kepada seluruh masyarakat untuk menunjang terlaksananya program *landreform* di Indonesia mengingat bahwa fungsi dan tugas Badan Pertanahan Nasional seperti yang dijelaskan pada Pasal 2,3 Peraturan Presiden republik Indonesia No 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa BPN/ATR memiliki wewenang penuh terhadap pengawasan dan penindakan penguasaan tanah Absentee/Guntai. Selain itu dalam pasal 197 dan 198 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pertanahan Republik Indonesia disebutkan bahwa direktorat *landreform* memiliki wewenang melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis serta pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah (*Landreform*). Artinya Direktorat BPN/ATR mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepemilikan tanah secara Absente/Guntai. Dari aturan yang memuat tugas dan fungsi Direktorat Landreform dan peran BPN/ATR dalam pengawasan dan penindakan tanah Absentee/Guntai diatas berkaitan dengan ketentuan pokok *landreform* yang peraturan pelaksana yang termuat dalam Pasal 7,10, dan 17 UUPA.

Sehubungan dengan hal itu masih banyak penulis amati dan penulis melakukan wawancara tidak terstruktur di salah satu kecamatan bahwa masih ada dan terjadi kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai di Kota Batu.

Sehingga dengan penelitian yang dilakukan ini nanti nya diharapkan dapat menegakan peraturan yang sesuai dengan dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UUPA dan Peraturan-peraturan yang terkait dengan larangan kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai di Kota Batu mengingat bahwa masih banyak aturan-aturan tersebut belum tercapai sepenuhnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk penulisan hukum terkait dengan tanah-tanah yang dikuasai secara Absentee/Guntai di Kota Batu, maka membuat penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati, meneliti dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan nya melalui judul : “Upaya Kantor Pertanahan Dalam Pengawasan dan Penyelesaian terhadap Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai (Studi BPN Kota Batu)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar dan bukti kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai di Kota Batu?
2. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah Absentee/Guntai yang ada di Kota Batu?
3. Bagaimana upaya kantor BPN Kota Batu dalam pengawasan dan penindakan masalah kepemilikan hak atas tanah Absente guntai?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa dasar dan bukti kepemilikan tanah secara Absentee/Guntai di Kota Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah Absentee/Guntai yang ada di Kota Batu
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BPN Kota Batu dalam mencegah, mengawasi dan menyelesaikan permasalahan terkait kepemilikan tanah secara Absente Guntai

D. Kegunaan Penelitian

Berdasar apa tujuan yang ingin dicapai penulis, maka Kegunaan dari penulisan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini secara Teoritis di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran selanjutnya dalam menegakan pengawasan dan penindakan terhadap kepemilikan tanah Absentee/Guntai
 - b) Di harapkan mampu memberikan pemikiran positif terhadap pengembangan solusi masalah yang sudah ada agar tidak terjadi dan berkembang lebih luas
 - c) Di harapkan sebagai telaah, bahan koreksi dan dapat menjadi kontribusi untuk menjujung peningkatan pendidikan mata kuliah Hukum Agraria di perguruan tinggi
 - d) Sebagai tambahan dokumen akademik untuk kepentingan pendidikan peserta akademika serta menambah bahan wawasan

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Berguna sebagai wawasan peneitian yang lebih guna memahami lebih jauh terkait larangan kepemilikan hak tanah secara Absente/guntai dan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar Strata-1 di bidang Ilmu Hukum

b. Bagi Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang

Dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Kota Batu dalam pelaksanaan larangan Tanah Absentee/Guntai pada umumnya dan dalam pembuatan kebijakan Hukum Pertanahan selanjutnya dan dijadikan masukan untuk melakukan tertib hukum yang dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dan aparat setempat yang berkaitan dengan permasalahan tanah khususnya Tanah Absentee/Guntai

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini di harapkan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat luas agar dapat dan mengetahui bagaimana pelarangan kepemilikan hak atas tanah secara absente guntai agar dalam kepemilikan tanah pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan di atur oleh uu sesuai peraturan dan prosedur yang sudah ada

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat. Dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan¹⁶. Kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai pemilikan tanah absente/guntai akan dilihat dari sudut Yuridis mengenai pengaturannya dalam Undang-undang, penerapannya dalam masyarakat serta upaya penindakan jika terjadi pelanggaran. Pendekatan yuridis digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisis aspek-aspek hukum yang berlaku saat ini, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum sebagai kaidah perilaku yang hidup di dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk melakukan penelitian tugas akhir ini guna memperoleh data dari sumber yang cukup dan akurat penulis menggunakan populasi wilayah di 1(Satu) Kecamatan dan mengambil sampel dengan teknik sampling berupa purposive atau berdasarkan kriteria, yaitu Kecamatan Batu khususnya di Desa Temas karena wilayah tersebut memiliki tanah Absente/Guntai yang paling banyak. Terkait

¹⁶ Bambang Waluyo. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek .Jakarta . Sinar Grafika.Hal 16

pemilihan lokasi penelitian ini penulis beralasan agar mendapatkan informasi guna melengkapi penelitian. Dalam mengembangkan penelitian maka penulis memilih instansi terkait yaitu ATR/BPN Kota Batu yang berlokasi di Jalan Mawar No 2 Songgokerto kec Batu Kota Batu , Jawa Timur 65312. Dalam penelitian ini penulis juga mempertimbangkan lokasi penelitian ini sangat dekat dan dapat di jangkau guna mencari informasi dan data yang akurat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya di Kota Batu sendiri yang banyak penulis jumpai terdapat masalah terkait masalah Absente/Guntai yang masih belum di ketahui banyak oleh masyarakat

3. Sumber data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah teknik pengumpulan data /informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian di BPN/ATR Kota Batu terkait permasalahan yang penulis paparkan di atas

1) Wawancara

Hasil wawancara dengan responden terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian guna memperoleh informasi atau data tentang Kepemilikan tanah Absente/Guntai

2) Dokumen

Yaitu dalam memperkembangkan dan memper jelas penelitian ini dengan bukti yang jelas pula maka penulis menganggap dirasa perlu adanya teknik pengambilan data tersebut dengan cara dokumentasi yang meliputi beberapa cara antara lain dokumen foto, dokumen-dokumen tertulis dan lain sebagainya

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penulisan ini adalah buku-buku dan data hukum yang di peroleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur yang ada , artikel, serta peraturan perundang-undangan berlaku maupun sumber sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.guna memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang dapat menunjang peneitian.Sumber penelitian ini juga diperoleh dari Undang-Undang pokok Agraria Pasal 10 UU No 5 Tahun 1960 UUPA yang lebih sempitnya diatur dalam Pasal 7, 10, 17 UUPA, UU No 56 Prp Tahun 1960, Peraturan Menteri agraria dan tata ruang No 18 tahun 2016 dan peraturan pelaksanaan terkait dengan ketentuan Pasal 33 Ayat UUD 1945 serta peraturan pemilikan tanah secara absentee yaitu Peraturan Pemerintah No 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah pemberian ganti rugi,Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 3 Jo Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964.Dan dasar Hukum dari pada Larangan kepemilikan tanah pertanian secara Absentee/Guntai pada Pasal 10 UUPA

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, sumber internet dan lain sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah¹⁷. Yang demikian dilakukan dengan pedoman wawancara yang terstruktur. Dalam wawancara terstruktur ini peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis¹⁸. Untuk mendukung penelitian ini maka penulis akan menggunakan beberapa responden yaitu penggarap tanah dengan teknik random sampling atau acak dan Pihak Kantor BPN Kota Batu, Pihak Kecamatan Batu dan Aparat Desa Temas dengan teknik purposive sampel

- b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data diskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan

¹⁷ Hadari Nawawi .1993 . *Metode Penelitian Bidang Sosial*.Yogyakarta.Gajah Mada University Press , Hal 100

¹⁸ Sugiyono.2016 . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* .Bandung . Alfabeta .Hal 233

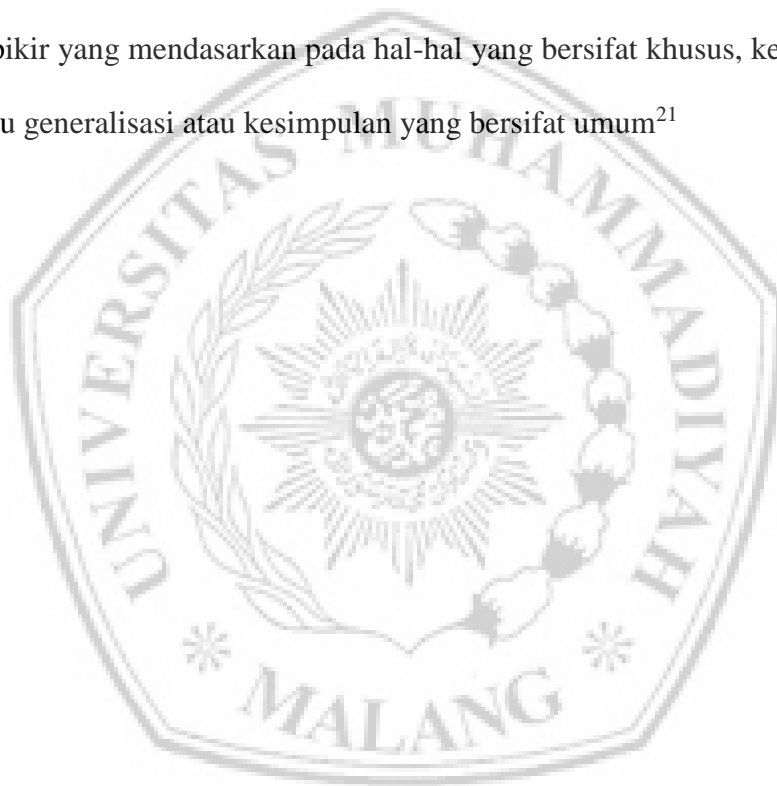
pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini, serta sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun lakukan. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, logis, efektif, diolah dan diteliti serta dievaluasi, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data¹⁹. Berikut ini adalah uraian analisis data yang dilakukan:

- a. Tahap awal adalah mempelajari data hasil studi pendahuluan seperti jurnal-jurnal penelitian terdahulu serta data sekunder berupa buku-buku serta Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah penelitian yang peneliti angkat
- b. Mempersiapkan alat serta bahan yang akan digunakan untuk wawancara yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan baik kepada pihak BPN Kota Batu, Pihak Kecamatan Batu maupun Bumiaji serta pemilik dan penggarap tanah Absentee/Guntai
- c. Pada tahap wawancara peneliti mencatat atau merekam jawaban responden yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
- d. Setelah melakukan wawancara dengan responden peneliti mencari data pendukung pada Kantor BPN Kota Batu demi melengkapi hasil wawancara yang sudah dilakukan
- e. Setelah data-data yang diperlukan sudah terkumpul maka peneliti berusaha untuk merangkum, mengambil data yang pokok dan penting,

¹⁹ Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal 172

yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan menghasilkan kesimpulan yang tepat

Analisis dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti²⁰.setelah dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan yang bersifat umum²¹



²⁰ Soejono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta.Hal 6

²¹ Soetrisno Hadi.1995. Metodologi Research. Yogyakarta. Andi offset. Hal 7